

## DAFTAR RUJUKAN

### BUKU:

- Adami Chazawi, S. H. (2022). *Hukum pidana materiil dan formil KORUPSI di Indonesia*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Angraeni, N., Bunga, D., Citranu, C., & Aris, A. (2024). *Hukum Pidana: Teori Komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Asikin, Zainal. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Press.
- Chazawi, A. (2021). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi: Edisi Revisi*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Chazawi, A. 2022. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Danil, E. (2021). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Effendi, E. 2021. *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Efritadewi, Ayu. 2020. *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: Umrah Press
- Feka, M., Masturi, R., Citranu, C., Yase, I. K. K., Nur'aini, L., Ramadhansyah, D., ... & Rifai, A. (2024). *Buku Ajar Hukum Pidana Korupsi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Harahap, M. Y. 2020. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, E. 2022. *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Edward O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.
- Imran, I. (2023). *Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq, H. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Penelitian, Tesis, dan Desertasi*. Bandung: Alfabeta
- Mikhael, L., Wardani, D. E. K., Riza, K., Romdoni, M., Amalia, M., Sulaiman, H., ... & Ihsan, R. N. (2023). *Hukum Pidana Diluar Kodifikasi*.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

- Saragih, Y. M. (2021). *Pengendalian Tindak Pidana Korupsi*. Cattleya Darmaya Fortuna.
- Soekanto, S. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suddin, S. (2024). Sejarah Indonesia. *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*, 25.
- Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Zachrie, R. (Ed.). (2009). *Korupsi mengorupsi Indonesia: sebab, akibat, dan prospek pemberantasan*. PT Gramedia Pustaka Utama.

#### **ARTIKEL DALAM JURNAL:**

- Afzil Ramadian, S. T., Tr, M. M., Abrianto, D., Th, S., & Hastina Febriaty, S. E. (2025). Manajemen Strategi dalam Upaya Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif. MEGA PRESS NUSANTARA.
- Andreyani, B., Hidayatullah, H., & Suyoto, S. (2019). Kewenangan Rangkap Jaksa Sebagai Penyidik, Penuntut Umum Dan Saksi Pelapor (Verbalisan) Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Jurnal Suara Keadilan*, 20(2), 147-160.
- Arifin, M. (2018). "Analisis Kewenangan Polri dalam Melakukan Penyidikan Penangkapan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 21, Edisi Khusus (hlm.7).
- Arismaya, A. D. (2021). Whistleblowing, KPK Indonesia dan CPIB Singapura. *Aktiva: Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 6(2), 53-63.
- Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan". *Binamulia Hukum*, Volume 31, (hlm. 177-191)
- Aziz, A. (2018). "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Teori Negara Hukum". *Jurnal Dinamika Hukum dan Keadilan*, Volume 45, (hlm.7-8).
- Baidi, R. (2019). Peluang Dan Tantangan Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, Volume 2, (hlm. 4)
- Desianto, R. (2022). "Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi". *Kertha Wicaksana*, Volume 23, (hlm.10-16).

- Febriani, A. (2023). Fungsi Dan Kedudukan Lembaga Kpk Indonesia Dan Cpi Singapura Dalam Mewujudkan Independensi (Doctoral Dissertation, Iain Salatiga).
- Hariadi, T. M., & Wicaksono, H. L. (2013). Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Negara Singapura dan Indonesia. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Volume 2, (hlm. 3-6).
- Herdiansyah. (2017). "Dualisme Penanganan Korupsi antara KPK dan Kejaksaan". *Jurnal Unair*, Volume 19, (hlm. 46-50).
- Kaligis, O. (2016). "Pengawasan Terhadap Jaksa selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi". Bandung (hlm. 16).
- Kaligis, R. V. (2020). Implikasi Hukum Atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 9(1).
- Kamal, A. M., Nawawi, J., & Syamsu, S. (2025). Analisis Perbandingan Etika Pemerintahan Di Negara-Negara Dengan Tingkat Korupsi Rendah: Pembelajaran Untuk Indonesia. *Journal Of Innovation Research And Knowledge*, 4(9), 6543-6554.
- Komariah, M. (2016). Integritas Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Kpk) Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(1), 76-91.
- Kurniawan, A. (2015). Politik hukum pembentukan lembaga-lembaga penyidik tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Lasmadi, S. (2020). "Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana" . *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 20, (hlm. 10).
- Lestari, Y. S. (2018). Korupsi: Suatu Kajian Analisis di Negara Maju dan Negara Berkembang. *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, Volume 3, (hlm. 21).
- Naibaho, P. Y. A., & Purwoto, P. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1-15.

- Nugroho, C. J., Tan, W., & Situmeang, A. (2024). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia Dan Singapura. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 8(2), 60-77.
- Nugroho, H. (2012). "Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia". *Media prima Aksara*, Volume 30, (hlm.67).
- Nugroho, H. (2013). Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3), 392-401.
- Pahlevi, F. (2022). Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen. *El-Dusturie*, Volume 2, (hlm. 12-15).
- Priatiningsih, H. (2023). Analisis Sistem Hukum Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Antara Sistem Hukum Amerika Serikat, Malaysia, Dan Singapura. *Jurnal Hukum Positum*, 8(1), 1-21.
- Sanjaya, W. (2018). Sinkronisasi penyelidikan dan penyidikan oleh POLRI, Kejaksaan dan KPK terhadap pelaku tindak pidana korupsi. *Jurnal de jure*, 10(1).
- Saragih, Y. (2020). Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang), Volume 4, (hlm. 14)
- Satria Ferry, S. H., Rani, F. A., SH, M., Eddy Purnama, S. H., & Sjafei, S. (2023). Eksistensi Kewenangan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi Indonesia dan Beberapa Negara. *Hawa dan AHWA*.
- Setyo, A. (2023). "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Uang Dengan Modus Pendirian Perusahaan Cangkang". *Universitas Islam Sultan Agung*, Volume 15, (hlm.27).
- Sosiawan. (2019). "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan pemberantasan Korupsi". *Jurnal Penelitian Hukum Dejure*, Volume 19, (hlm. 2).
- Subaidi, J., & Afrizal, T. Y. (2023). Kedudukan Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, Volume 7, (hlm. 65-77).

- Lengkong, L. Y. (2023). Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 9(3), 351-364.
- Tantra, A. D. (2021). “Whistleblowing, KPK Indonesia dan CPIB Singapura”. *AKTIVA Jurnal Akuntansi*, Volume 45, (hlm. 57-58).
- Wijaya, P. M. K., & Suyatna, I. N. (2014). Tinjauan Yuridis Mengenai Kewenangan Penyidikan Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiwa*, 3(3), 1.

#### **ARTIKEL DALAM INTERNET:**

- Marwata, Alexander. “Wakil Ketua KPK Akui Ada Ego Sektoral dalam Pemberantasan Korupsi.” *Metro TV News*, 3 Juli 2024. <https://www.metrotvnews.com/play/kBVCaOpp-wakil-ketua-kpk-akui-ada-ego-sektoral-dalam-pemberantasan-korupsi>.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127) dan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76) dan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209).
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134) dan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197) dan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 298) dan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 dan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-undang Pencegahan Korupsi (PCA) tahun 1960 Tentang CPIB Singapura.

